

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 –2021. Dengan Mepedomani RKPD tahun 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA Tahun 2019.

3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, diawali dengan membuat SK Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah (terlampir) dengan menjabarkan Fungsi dari masing-masing Tim sesuai Tugas dan Fungsinya. Tim Penyusunan Renja ini berasal dari Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya dan Sekretariat yang bertugas membuat dan menyusun Renja sesuai arahan dan rekomendasi dari Tim Penyusunan Renja.

Setelah itu mengadakan Rapat Koordinasi Sinergitas Program dengan Kabupaten/kota dan Bidang Teknis terkait di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Rakor Sinergitas ini bertujuan menghimpun masukan tentang program/kegiatan yang akan di laksanakan dan dimasukkan dalam rencana kerja untuk tahun 2019. Dalam Rapat tersebut di undang Narasumber dari Bappeda, Badan Keuangan Daerah dan BPKP yang memberikan arahan tentang Program/Kegiatan sekaligus memberikan penajaman terhadap Indikator yang terdapat dalam Renja.

Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah :

1. Mempelajari Visi dan Misi, Kebijakan dan Program prioritas dalam RPJMD dan Renstra.
2. Melakukan Rapat dengan Kabupaten/Kota tentang Program dan Kegiatan
3. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
4. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi.
5. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

6. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Dalam kegiatan awal penyusunan ini telah dilakukan Rapat Koordinasi dengan Kab/Kota dengan memperhatikan Rencana Kerja (Renja) Kab/Kota yang telah diakumulasikan dalam usulan program/kegiatan yang ada pada masing-masing Kab/Kota. Terutama dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian Sosial RI. Dengan mempertimbangkan Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan yang hendak dicapai di Tahun 2019.

Untuk penetapan Renja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dilakukan setelah adanya penetapan RKPD Tahun 2019 oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Renja yang dibuat harus disesuaikan dengan RKPD yang telah ditetapkan sehingga Program/Kegiatan yang ada tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dapat diusulkan dalam RAPBD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang nantinya Renja tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Agenda Kerja Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2019

Agenda Penyusunan	Tahapan Penyusunan Renja (Bulan)							
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Pembentukan Tim Renja dan Pengumpulan data dan Informasi								
Rancangan Awal Renja dan Orientasi Renja								
Rapat dengan Kab/Kota								
Penyempurnaan Renja								
Verifikasi Renja								
Rancangan Akhir								

Agenda Penyusunan	Tahapan Penyusunan Renja (Bulan)							
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Penyempurnaan dan Penetapan Renja Perangkat Daerah								

1.2 Landasan Hukum

1. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
5. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
7. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 27/HUK/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial RI Tahun 2015-2019.
14. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Propinsi Sumatera Barat.
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daeah Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tanggal 5 Februari 2018.
 19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.
 20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Biaya APBD Tahun Anggaran 2018
 21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 22. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
 23. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/99/II/RENMAKRO/Bappeda-2018 tentang Penyampaian Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 24. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor 954/107/SK/APBD/DINSOS/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah agar dapat menyelesaikan permasalahan / hambatan dan tantangan utama serta menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dalam kurun waktu 1 Tahun Anggaran yaitu 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Untuk menyiapkan rancangan awal dari program dan kegiatan yang diusulkan serta merupakan jabaran dari Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
2. Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah untuk mendiskripsikan tentang program-program prioritas pembangunan nasional dan daerah yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Landasan Hukum
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Sistematika Penulisan
2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - d. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- a. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
 - b. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - c. Program dan Kegiatan
4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V PENUTUP
- LAMPIRAN TABEL

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-C.29)

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Capaian Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun 2017 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2017 telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari total Anggaran yang dianggarkan untuk Belanja langsung sebesar Rp 33.710.115.112,- dipergunakan untuk membiayai 15 program dan 108 jenis kegiatan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan 8 UPTD. Secara pencapaian target dan realisasi anggaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 yaitu secara umum pencapaian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk keuangan sebesar 92,99% dan fisik sebesar 95,72%.

Dalam pencapaian terhadap hasil evaluasi LAKIP yang disusun telah sesuai dengan yang diharapkan dimana dalam Target RPJMD hasil evaluasi LAKIP untuk Tahun 2017 Dinas Sosial mendapat hasil B dengan menyesuaikan terhadap capaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra.

b. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra

Review hasil pelaksanaan Renja SKPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target dan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2017.

Dari 15 Program dan 108 kegiatan terdapat beberapa program/kegiatan yang sudah mencapai hasil yang maksimal yaitu diatas 95% dan masih belum maksimal yaitu dibawah 95%. Adapun program/kegiatan yang sudah mencapai diatas 95% meliputi :

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 97,15%
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar 96,50%
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 98,16 %
- Program Pembinaan Anak terlantar sebesar 98,98%
- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma sebesar 99,55%
- Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo sebesar 99,21%
- Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) sebesar 98,45%
- Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial sebesar 99,86%

Sedangkan untuk program yang masih pencapaian dibawah 95% adalah sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 94,55%
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 86,72%
 - Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset sebesar 93,94%
 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial sebesar 83,86%
 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial sebesar 92,55%
 - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya sebesar 72,26%.
 - Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba sebesar 93,58%
- b. Perkiraan capaian tahun 2018 diperkirakan bisa mencapai hasil yang maksimal yaitu diatas 95% sehingga diharapkan penyerapan anggaran bisa dilaksanakan sesuai program kerja yang telah disusun dalam APBD Tahun 2018.Sampai dengan Februari 2018, pencapaian terhadap pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018 sudah mencapai 8,39 % untuk capaian keuangan dan 9,14 % untuk capaian Fisik.
- c. Belum tercapainya program/kegiatan diharapkan dapat tercapai maksimal di tahun 2019. Selain itu belum tercapainya penanganan sebagaimana tertuang dalam Renstra

karena dukungan anggaran yang masih belum memungkinkan seperti yang ditetapkan dalam Renstra. Faktor penyebab kegiatan yang tidak tercapai adalah dikarenakan adanya kegiatan yang tidak terlaksana dengan maksimal.

- d. Implikasi terhadap pencapaian target capaian program/kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Selain itu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dapat tergali dan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.

Dapat di lihat dalam lampiran pada tabel T-C.29

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)

Untuk bidang Sosial Standar Pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sedangkan untuk Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah merujuk pada SPM Bidang Sosial yang terdiri dari :

- a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Skala Provinsi.
- b. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti sosial skala Provinsi.
- c. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Provinsi
- d. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Provinsi
- e. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Provinsi
- f. Evaluasi korban bencana skala Provinsi
- g. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial (Penyelenggaraan Jaminan Sosial skala Provinsi)

Berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam SPM, capaian tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian SPM (%) 2015	
			Target	Capaian
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:			
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Provinsi	1 Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	17,17	17,1

	b. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti sosial skala Provinsi	2	Persentase (%) Panti Sosial skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	100	100
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial:				
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi	3	Presentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	100	100
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	4	Presentase (%) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.	100	100
3	Penanggulangan korban Bencana:				
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	5	Presentase (%) kabupaten/kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.	100	100
	b. Evaluasi korban bencana skala provinsi	6	Presentase (%) kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	100	100
No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian SPM (%) 2015		
			Target	Capaian	
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial: - Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi	7	Presentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	100	100

Dalam tabel diatas bahwa untuk pencapaian target yang dilakukan bisa disimpulkan bahwa hampir semua target sasaran bisa dicapai dengan maksimal. Keberhasilan pencapaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh komitmen pimpinan yang baik, restrukturisasi kelembagaan yang efisien, pemberdayaan sumber daya manusia yang efektif, strategi pemanfaatan SDM yang tepat dan manajemen pengelolaan anggaran yang sesuai dengan peruntukannya.

Untuk lebih terinci dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (Thn n-2)	Tahun 2017 (Thn n-1)	Tahun 2018 (Thn n)	Tahun 2019 (Thn n+1)	Tahun 2016 (Thn n-2)	Tahun 2017 (Thn n-1)	Tahun 2018 (Thn n)	Tahun 2019 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Anak Terlantar											
	1 Pelatihan dan Keterampilan Anak Terlantar Putra dalam Panti (PSABR Budi Utama Lubuk Alung)	80%	160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	
	2 Pelatihan dan Keterampilan Anak Terlantar Putri dalam Panti (PSBR Harapan Padang Panjang)	80%	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	210 org	210 org	
	3 Pengurus panti sosial swasta		120 org	125 org	125 org	125 org	125 org	125 org	125 org	125 org	125 org	
	4 Pendamping anak terlantar		50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	55 org	55 org	
B	Lanjut Usia Terlantar											
	1 Pelayanan dan Pemberian Keterampilan Lanjut Usia Terlantar dalam Panti (PSTW Sabai Nan Aluih dan PSTW Kasih Sayang Ibu)	60%	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	
	2 Pendamping sosial lanjut usia		33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	
C	Penyandang Cacat											
	1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Penyandang Cacat dan Eks Trauma Dalam Panti (PSBN Tuah Sakato)	60%	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	
	2 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma dalam panti (PSBG Harapan Ibu)	60%	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	
	3 Pendamping sosial penyandang cacat berat	60%	22 org	22 org	22 org	25 org	25 org	22 org	22 org	25 org	25 org	
	4 Rujukan bagi penyandang Eks Psikotik		27 org	100 org	100 org	100 org	100 org	27 org	20 org	25 org	25 org	
	5 Pelatihan penyandang cacat potensial		20 ODK	20 ODK	20 ODK	20 ODK	20 ODK	20 ODK	20 ODK	25 ODK	25 ODK	

D	Penyandang Penyakit Sosial											
1	Pelayanan, pendidikan dan keterampilan dalam panti (PSKW Andam Dewi Solok)	60%	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org
2	Eks Korban NAPZA	60%	20 org	20 org	-	-	-	20 org	20 org	25 org	25 org	
3	Siswa / pelajar yang mendapatkan penyuluhan NARKOBA	60%	70 org	70 org	70 org	-	-	70 org	70 org	100 org	100 org	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E	Anak Asuh											
1	Anak asuh putra dalam panti (PSABR Budi Utama Lubuk Alung)	80%	75 org	75 org	75 org	75 org	75 org	75 org	75 org	75 org	75 org	75 org
2	Anak asuh putri dalam panti (PSAA Tri Murni Padang Panjang)	80%	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org
F	Keluarga Miskin											
1	Keluarga rentan yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan	80%	525 KK	400 KK	440 KK	440 KK	440KK	400 KK	440 KK	440 KK	440 KK	440 KK
2	Panti Swasta Se Sumatera Barat	80%	4000 Anak	4000 Anak	4000 Anak	4000 Anak	4000 Anak	4000 Anak	4000 Anak	4000 Anak	4000 Anak	4000 Anak
3	Masyarakat terasing yang mendapatkan bimbingan keterampilan	80%	30 KK	30 KK	30 KK	30 KK	35 KK	30 KK	30 KK	35 KK	35 KK	
4	Pekerja Migran Bermasalah	80%	69 org	69 org	69 org	69 org	69 org	69 org	69 org	69 org	69 org	69 org
G	Bencana Alam											
1	Masyarakat yang tinggal dikawasan bencana	80%	-	50 org	55 org	55 org	55 org	55 org	55 org	55 org	55 org	55 org
H	Kelembagaann Sosial											
1	FK Karang Taruna dan Pengurus		1 keg	8 keg	-	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
2	Pengelola WKSBM		40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org
3	Penyuluhan Kesejahteraan Sosial		24 PMKS	24 PMKS	24 PMKS	24 PMKS	24 PMKS	24 PMKS	24 PMKS	24 PMKS	24 PMKS	24 PMKS

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan penjabaran operasional dari RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 pada Prioritas 8 yaitu Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal, telah melaksanakan program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Hubungan Sinergi		
		APBD	APBN	Kab/Kota
1	Program Pembinaan Anak Terlantar	360 org/tahun	240 anak	
2	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	150 org/tahun	360 orang	
3	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	180 org/tahun dan 175 org/tahun	140 orang	
4	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	40 org/tahun	205 orang	
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	5128 org/tahun	3910 KK	
6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam	15 KK/tahun	280 orang	

- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Belum tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat dari seluruh Kab/Kota. Untuk menentukan jumlah sasaran pembangunan kesejahteraan sosial perlu adanya data yang valid agar meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

2. Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang sangat bervariasi menyebabkan pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial mulai dari Perencanaan sampai penganggaran belum maksimal.

Hambatan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan adalah :

1. Perubahan kewenangan yang membuat Perangkat Daerah harus menyesuaikan kembali Program/Kegiatan
2. Keterbatasan anggaran yang ada membuat pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat dalam pencapaian target dan sasaran.
3. Kurangnya dukungan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target dan sasaran sehingga tidak sinkronnya Program/Kegiatan yang ada di Provinsi dan Kab/Kota.

- c. Dampak program kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah adalah: Sesuai dengan Prioritas 8 dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yaitu : **“Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal “** , berdasarkan data penanganan kesejahteraan sosial yang telah di berdayakan dari tahun 2010 s./ d 2015 adalah :

APBD

No	Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Anak Terlantar (dalam panti)	360/thn	360/thn	360/thn	360/thn	360/thn
2	Lanjut Usia Terlantar (dalam panti)	180/thn	180/thn	180/thn	180/thn	180/thn
3	Anak Asuh (dalam panti)	155/thn	155/thn	155/thn	175/thn	17 5/thn
4	Penyandang Cacat (dalam panti)	150/thn	150/thn	150/thn	150/thn	150/thn
5	Eks Penyandang Penyakit Sosial (dalam panti)	40/thn	40/thn	40/thn	40/thn	40/thn
6	Keluarga Miskin	415 org	415 org	415 org	415 org	415 org
7	Anak Asuh Panti Swasta	5000 org	4668 org	4700 org	4850 org	5000 org
8	Bencana Alam	15 KK	15 KK	15 KK	15 KK	15 KK
9	Keluarga Miskin/Rentan	410 KK	415 KK	415 KK	415 KK	410 KK

APBN

No	Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pemberdayaan FM	3800 KK	4600KK	1600KK	1200KK	1200 KK
2	Pemberdayaan Keluarga	260 KK	160 KK	160 KK	160 KK	265 KK
3	Pemberdayaan KAT	570 KK	50 KK	111 KK	50 KK	277 KK

5	Pemberdayaan PSM	62 PSM	55 PSM	50 PSM	179 TKSK	158 TKSK
6	Pemberdayaan Orsos	30 Orsos	44 Orsos	51 Orsos	45 LKS	9 Orsos
7	Pemberdayaan KT	62 KT	49 KT	54 KT	50 KT	65 KT
8	K2KS	4 TMP, 7 rumah	3 TMP, 10 rumah	2 TMP	2 TMP	3 TMP
9	Pelayanan dan Perlindungan Kesos Anak	200 org	640 org	280 org	280 org	108 org
10	Lanjut Usia	52 org	30 org	100 org	50 org	70 org
11	Penyandang Cacat	30 org	360 org	360 org	200 org	50 org
12	Anak Cacat	-	-	-	-	-
13	Pelayanan dan Perlindungan Eks Napza	30 org	45 org	45 org	45 org	100 org
14	Anak Nakal	-	-	-	-	-
15	Rehabilitasi Tuna Sosial	115 org	123 org	120 org	120 org	110 org
16	Bencana Alam	210 org	280 org	240 org	200 org	88 KK
17	Perlindungan Sosial KTK- PM	60 org	30 org	40 org	30 org	106 org

Untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah, perlu didukung dengan beberapa Program / Kegiatan antara lain :

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Dalam Program pengentasan kemiskinan, Dinas Sosial melakukan Pelatihan/Bimbingan motivasi/keterampilan berusaha bagi keluarga miskin bertujuan untuk meningkatkan motivasi berusaha bagi keluarga miskin/tidak mampu dalam meningkatkan keterampilan berusaha serta menggerakkan dan memotivasi masyarakat dalam upaya penanganan permasalahan keluarga dengan mengembangkan jiwa dan semangat kesetiakawanan sosial dalam mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera. Juga diadakan bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang di fokuskan di Kota Padang pada 4 Kecamatan dengan bantuan terhadap masyarakat miskin sebanyak 440 Orang.

- b. Sosialisasi Penguatan Peran Keluarga Masyarakat melalui Pos Pemberdayaan Keluarga.

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat perlu peran aktif Pos Pemberdayaan Keluarga yang memberikan motivasi dalam meningkatkan dan menumbuhkan usaha mikro dan kecil. Sebagai suatu usaha mengingatkan masyarakat bahwa tahun 2017

separuh dari orang miskin yang ada di nagari sudah meningkat taraf hidupnya. Pemberdayaan peran keluarga dengan membentuk kelompok-kelompok usaha ikut berperan aktif dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

c. Pengadaan Beras untuk Panti swasta.

Pengadaan ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga panti melalui pemberian bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras dan telah didistribusikan kepada 123 panti sosial di 19 kab/kota untuk 4.429 orang anak yang berada dalam panti swasta dan masing-masing anak mendapat 400 gr beras selama 118 hari.

d. Melakukan Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan memanfaatkan bahan lokal yang sekaligus menjadi mata pencaharian sehingga dapat menuju kehidupan yang baik dan sejahtera pada masa yang akan datang.

Dengan adanya dukungan tersebut diharapkan dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah bisa tercapai secara maksimal.

e. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Pelaksanaan pembangunan dewasa ini disatu sisi berdampak positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat, namun disisi lain juga berimplikasi negatif pada masyarakat, diantaranya adanya kecenderungan semakin meningkatkan kuantitas maupun kualitas PMKS. Didasari bahwa hal ini merupakan tantangan kedepan yang semakin berat, jika tidak dilakukan penanganan secara tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial semakin luas, serta mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Adapun peluang yang ada yaitu berupa :

1. Dukungan dalam bentuk program dan kegiatan Askesos
2. Program Keluarga Harapan (PKH)
3. Program pembangunan Perkotaan dan Pedesaan
4. Program Penanggulangan Bencana.
5. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin baik melalui panti maupun luar panti.
6. Program Peningkatan untuk masyarakat Pesisir dan Kepulauan.

Tantangan yang ada dapat berupa :

1. Konflik Sosial dalam masyarakat terhadap pencapaian Target dan Sasaran Kegiatan
2. Letak Geografis Kab/Kota

f. Formulasi Isu-Isu Penting

Isu-Isu Strategis yang dikumpulkan dari beberapa rapat berupa Hasil dari Forum Perangkat Daerah, Musrenbang dan Rekomendasi sebagai catatan strategis untuk ditindak lanjuti adalah sebagai berikut :

- Masih terbatasnya akses PMKS terhadap pelayanan dasar dikarenakan belum adanya data by name by address yang lengkap
- Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial
- Belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- Masih Banyaknya masyarakat miskin yang belum mendapatkan fasilitas bantuan jaminan sosial seperti askesos (BPJS)
- Pemberian bantuan kepada penyandang Disabilitas berupa bantuan UEP, bantuan untuk alat bantu penyandang disabilitas dan bantuan lain mendukung penyandang disabilitas bisa mandiri dan berusaha.
- Bantuan untuk pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam Bentuk KUBE sebagai pemberdayaan terhadap masyarakat miskin yang masih kurang merata

Dampak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31)

Rancangan awal RKPD Dinas Sosial terdapat program prioritas dalam pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam rancangan ini diharapkan dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mengentaskan atau pengurangan tingkat kemiskinan dalam bentuk Program/Kegiatan yang akan diusulkan. Review terhadap rancangan dapat dilihat dalam tabel T-C.31.

Dalam Rancangan Awal RKPD ini terdapat beberapa Kegiatan baru seperti :

1. Sosialisasi kegiatan Unit Institusi Layanan Sosial (UILS)

Dalam kegiatan ini merupakan dukungan terhadap kegiatan yang ada pada Kementerian Sosial RI, dimana kegiatan ini merupakan layanan terhadap Eks. Psikotik.

2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Merupakan Instruksi Gubernur Sumatera Barat tentang penilaian masyarakat terhadap layanan publik terhadap Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat

3. Sumbar Expo (Publikasi)

Merupakan kegiatan publikasi terhadap layanan dan hasil kreasi klien yang ada pada Dinas Sosial (+ 8 UPTD) kepada masyarakat luas.

4. Bimbingan Teknis Pemantapan Petugas Pendata PMKS

Merupakan Bimbingan terhadap petugas pendapat PMKS yang sarasannya adalah seluruh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) agar lebih profesional melakukan pendataan sehingga akan mendapatkan data yang akurat.

5. Pembuatan Buku Data PMKS dan PSKS

Tersedianya Buku Data PMKS dan PSKS di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Usulan kegiatan baru tersebut untuk mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Sosial RI.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32)

Penelaahan usulan program/kegiatan untuk masyarakat telah dirangkum dalam rancangan awal RKPD dan sudah termasuk dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah sehingga kegiatan yang ada di Kabupaten/Kota sudah terakumulasi dalam Renja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Usulan Program/Kegiatan ini merupakan kumpulan dari isu nasional dan peralihan kewenangan terhadap pelaksanaan kegiatan

Adapun usulan program/kegiatan yang berhasil di kumpulkan yaitu :

- a. Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai dan RASTRA Tahun 2019

Bantuan Beras Sejahtera yang merupakan Bantuan untuk masyarakat miskin, Sehubungan dengan berakhirnya Program Subsidi berubah menjadi lebih baik yaitu Bantuan Sosial Rastra yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT adalah bantuan pangan yang diberikan oleh Pemerintah dengan mekanisme akun elektronik yang digunakan membeli pangan di e-warong PKH, Rumah Pangan KITA atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan BULOG dan Bank HIMBARA. Untuk itu perlu bimbingan pendampingan dalam pelaksanaan BPNT.

c. Konsinyering Koordinator PKH Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan

PKH adalah Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial RI sehingga perlu dilakukan pertemuan untuk melihat perkembangan PKH dan Sumatera Barat dan mempersiapkan PKH yang akan Keluar Program ini ke dalam bentuk Pemberdayaan Bantuan KUBE.

d. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Rentan PMKS Gelandangan / Pengemis

Memberdayakan masyarakat Rentan Gelandangan/Pengemis dalam berusaha sesuai dengan kemampuannya.

e. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Korban HIV

Memberdayakan Korban HIV dengan memberikan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

f. Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanganan HIV Bagi PSKS

Bimbingan untuk pencegahan dan penanganan HIV khusus pendamping

g. Sosialisasi kegiatan Unit Institusi Layanan Sosial (UILS)

Untuk mendukung Kegiatan dari Kementerian Sosial RI

h. Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK

Bimbingan bagi PSM/TKSK untuk layanan Disabilitas yang perlu mendapat pelatihan dan pendidikan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas percepatan penurunan tingkat kemiskinan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur dan yang miskin secara intensif sehingga laju penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan lebih tinggi dari periode RPJM sebelumnya.

Sesuai dengan Tugas dan Pokoknya Kementerian Sosial RI bersama instansi yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Dinas Sosial sebagai OPD yang menangani kemiskinan mempunyai program prioritas sesuai RPJM sebagai berikut:

Program prioritas dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan adalah :

1. Pengendalian terpadu penanganan kemiskinan
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan/nagari
3. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
5. Pemberdayaan Fakir Miskin
6. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial
7. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
8. Pembinaan Anak Terlantar
9. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks.Trauma
10. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
11. Peningkatan aksesibilitas ke daerah tertinggal

Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud :

1. Penurunan jumlah penduduk yang menganggur secara lebih tajam
2. Penurunan jumlah penduduk miskin secara lebih tajam

3. Perluasan lapangan kerja
4. Meningkatnya ketersediaan lembaga penanggulangan kemiskinan
5. Meningkatnya akses dan produktivitas usaha mikro
6. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal

Sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah, Dinas Sosial sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya dikelompokkan ke dalam Pelayanan Dasar sehingga dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah lebih cepat tercapai. Adapun urusan yang diberikan ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat meliputi :

- Pemberdayaan Sosial
- Penanganan Warga Negera Migran Korban Perdagangan Orang
- Rehabilitasi Sosial
- Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Penanganan Bencana

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Penetapan Tujuan dan Sasaran dalam Renja ini diambil dari Tujuan dan Sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Hasil Evaluasi terhadap tujuan dan sasaran adalah penurunan tingkat kemiskinan dan Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, terpencil/daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan

Tujuan penetapan Renja ini diambil dari Tujuan yang terdapat dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021, adalah :

1. Menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatkan Partisipasi PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Sasaran Kegiatan

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat Selama masa periode RPJMD tahap kedua (2016-2021), adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai tersebut berpedoman terhadap RPJMD, Renstra dan RKPD sehingga diharapkan adanya keserasian dan keselarasan dalam mencapai Visi dan Misi.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor –Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

“Sesuai dengan pengalihan kewenangan dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka program/kegiatan yang diusulkan sesuai dengan Tugas dan Pokok serta Fungsi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Uraian Tugas”.

Program/kegiatan Renja Tahun 2019 meliputi sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Supir Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10. Penyediaan Logistik Kantor
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah
12. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
13. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
14. Penyediaan Makanan dan Minuman

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

1. Pengadaan Meubelier
2. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi, Alat Informasi
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
8. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

9. Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi dan Jaringan
 10. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
 11. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Monumen
 12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 13. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 14. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :**
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:**
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:**
1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
 2. Penatausahaan Keuangan SKPD
 3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 4. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
 5. Penyusunan Sinergitas Program Antar Kab/Kota
 6. Pengelolaan, Pengawasan, Pengendalian Asset SKPD
- 6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**
1. Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 2. Sosialisasi Program Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH)
 3. Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial
 4. Sosialisasi kegiatan Unit Institusi Layanan Sosial (UILS)
- 7) Program Pembinaan Anak Terlantar dengan kegiatan yaitu :**
1. Pengadaan Kelengkapan
 2. Seleksi Penerimaan Calon Kelayan
 3. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung)
 4. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Budi Utama)
 5. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar (PSBR Harapan Padang Panjang)
 6. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Tri Murni)
 7. Biaya Pendidikan Klien (Tri Murni)
 8. Penyediaan bahan obat-obatan dan Jasa dokter
 9. Penyediaan bahan pendidikan (Budi Utama)
 10. Pengadaan makanan dan minuman
 11. Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak

12. Sehari Bersama Anak
13. Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)

8) Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks.Trauma, yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang Disabilitas
2. Biaya makanan dan minuman kelayan
3. Penyediaan bahan obat-obatan dan Jasa dokter
4. Biaya kelengkapan kelayan
5. Pendayagunaan para penyandang Disabilitas
6. Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK
7. Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas
8. Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Karya (LBK)
9. Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh yang Peduli pada Penyandang Disabilitas

9) Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar, dengan kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni panti jompo
2. Biaya Kelengkapan Klien di Panti Jompo
3. Biaya makanan dan minuman klien dan Panti Jompo
4. Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Alat-alat Dokter Pakai Habis
5. Biaya Jasa Penguburan / Pemulangan Klien
6. Lanjut Usia Berkreasi

10) Program Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan kegiatan :

1. Pengadaan kelengkapan (biaya klien)
2. Biaya obat-obatan dan Jasa Dokter
3. Pendidikan dan Pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyakit sosial
4. Pengadaan makanan dan minuman

11) Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

1. Bimbingan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban Napza/HIV/AIDS
2. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Bimtek Penanganan HIV bagi PSKS
3. Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Korban HIV

12) Program Pemberdayaan Kelembagaa Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Bimbingan Jejaring Kerja LKS/Orsos se-Sumatera Barat dalam Rangka Akreditasi

2. Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
 3. Bimbingan bagi pengurus organisasi sosial se-Sumatera Barat
 4. Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM dan TKSK) Berprestasi Tk Sumatera Barat
 5. KSN Expo dan Award dalam HKSAN
 6. Penguatan Nilai-Nilai KSN
 7. Penguatan Kelembagaan LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
 8. Penguatan Peran Pilar Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 9. Penguatan Peran LKS Posdaya dalam penanggulangan kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesos
 10. Bimbingan Kapasitas bagi TKSK se-Sumatera Barat
 11. Forum Komunikasi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat
 12. Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat
 13. Pertemuan Forum Komunitas Pekerja Sosial (FK-PSM) se-Sumbar
 14. Pelatihan Dasar Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar
 15. Pelatihan Lanjutan Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar
- 13) Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan kegiatan yaitu :**
1. Bimbingan Motivasi Sosial/keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin (dalam rangka HARGANAS)
 2. Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3
 3. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Rentan PMKS Gelandangan/Pengemis
 4. Sosialisasi Undian Berhadiah Gratis (UGB)
 5. Pelayanan Orang terlantar
 6. Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
 7. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Komunitas Adat Terpencil
 8. Penetapan Calon Lokasi Pemberdayaan KAT
 9. Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional
 10. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
 11. Sumbar Expo (Publikasi)
 12. Bimbingan Teknis Pemantapan Petugas Pendata PMKS
 13. Pembuatan Buku Data PMKS dan PSKS
- 14) Program Penanganan Fakir Miskin**
1. Pengadaan Beras untuk Panti Swasta
 2. Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi

3. Penumbuhan/Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan
4. Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai dan RASTRA Tahun 2019
5. Sosialisasi E-Warong Pedesaan
6. Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan
7. Bantuan Penumbuhan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan
8. Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT
9. Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
10. Bantuan Pengembangan E-Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM

15) Program Penanganan Bencana dan Bencana Sosial

1. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Alam
2. Pemantapan Tim TRC Bencana Alam
3. Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam
4. Bantuan Logistik Bencana
5. Rakor Bencana Sosial
6. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial
7. Pertemuan Pendamping dan Operator PKH
8. Rakor Koordinator Program Keluarga Harapan
9. Sosialisasi Tingkat Provinsi Program Keluarga Harapan
10. Konsinyering Koordinator PKH Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan
11. Bimbingan Teknis Pendamping Program Keluarga Harapan

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 (Tabel T-C.33) terlampir.

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yaitu dalam pengentasan kemiskinan, terdapat beberapa Program/Kegiatan yang diusulkan untuk Tahun 2019 yang belum tertampung dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2016-2021. Sehingga Usulan tambahan Program/Kegiatan tersebut akan diusulkan dalam Perubahan RPJMD dan Renstra serta penambahan dalam Usulan untuk Anggaran Tahun 2019.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Penyusunan Renja Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Implementasi pencapaian Visi dan Misi tersebut tertuang dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2019 yang memuat Program dan Kegiatan menurut skala prioritas dalam pencapaian Kesejahteraan Sosial khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2019 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana
2	3	4	5	6
SOSIAL				
DINAS SOSIAL				
				38.869.080.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran			5.571.058.689
Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat menyurat	Sumatera Barat	2171 Buah Surat	109.055.140
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan Lisrik, Air dan Telekomunikasi OPD yang terpenuhi	Sumatera Barat	12 Bulan	800.230.000
Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Supir Kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan, sopir dan pengaman kantor	Sumatera Barat	12 Bulan	2.362.322.471
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Sumatera Barat	12 Bulan	157.823.748
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	Sumatera Barat	12 Bulan	93.039.600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Sumatera Barat	12 Bulan	169.175.070
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Sumatera Barat	12 Bulan	471.895.620
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Sumatera Barat	12 Bulan	223.196.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU	Sumatera Barat	12 Bulan	58.216.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Sumatera Barat	12 Bulan	284.888.140
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang diikuti	Sumatera Barat	12 Bulan	536.057.400
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi	kegiatan OPD yang terpublikasikan	Sumatera Barat	12 Bulan	36.605.000
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Tersedianya jasa pembinaan fisik dan mental aparatur	Sumatera Barat	12 Bulan	97.422.000

Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Kebutuhan makanan dan minuman rapat yang terpenuhi	Sumatera Barat	12 Bulan	171.132.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			6.954.583.337
Pengadaan Meubeleur	Jenis mebeluer yang dibeli	Sumatera Barat	288 Unit	479.400.000
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Komputer/Laptop atau software	Sumatera Barat	15 komputer, 9 laptop, 19 printer, 11 UPS	282.300.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Jenis Alat Studio/Alat Komunikasi dan Alat Informasi yang terpelihara	Sumatera Barat	31 Unit	12.450.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang terpelihara	Sumatera Barat	1 Tahun	200.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	kendaraan operasional/dinas yang terpelihara	Sumatera Barat	16 Unit Roda 4, 11 Unit Roda 2, 1 Roda 3	594.221.584
Pemeliharaan Rutin peralatan/ perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Sumatera Barat	1 Tahun	51.796.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Jenis Komputer/laptop dan jaringan komputer Kantor yang terpelihara	Sumatera Barat	136 Unit	76.510.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	Sumatera Barat	Dinas dan 8 UPTD	4.294.609.753
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Instalasi dan Jaringan Kantor yang terpelihara	Sumatera Barat	1 Tahun	59.683.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	Sumatera Barat	1 Unit	22.550.000
Pemeliharaan sedang./berat bangunan monumen	Terlaksananya Pemeliharaan TMP Kusuma Negara Padang	Sumatera Barat	1 Kegiatan	117.159.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Sumatera Barat	12 Bulan	48.200.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Sumatera Barat	1 Tahun	105.704.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Sumatera Barat	2 Mobil, 2 Motor Roda 2	610.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur			163.050.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	pakaian Dinas PNS/non PNS	Sumatera Barat	272 Orang	163.050.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			57.266.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	PNS yang mengikuti Bimtek	Sumatera Barat	4 Bimtek, 1 Sosialisasi	57.266.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1.155.001.304
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Pelaksanaan Forum OPD, Rencana Kerja OPD, RKA-DPA OPD	Sumatera Barat	8 Dokumen	192.583.654
Penatausahaan Keuangan SKPD	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK dan Pengguna Anggaran dan pengelola keuangan OPD lainnya	Sumatera Barat	1 Tahun	432.339.450

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP OPD, LPPD OPD, LKPJ OPD dan dokumen laporan lainnya	Padang	8 Dokumen	38.051.400
Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan SKPD	Terlaksananya Monev Program/kegiatan	Sumatera Barat	19 Lokasi	166.959.050
Penyusunan Sinergitas Program Antar Kab/Kota	Jumlah Peserta ikut penyusunan Sinergitas Program	Sumatera Barat	60 orang	171.877.750
Pengelolaan, Pengawasan, Pengendalian Asset SKPD	Honorarium Pengelola Aset	Sumatera Barat	1 Tahun	153.190.000
Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	Penjangkauan Pengguna Narkoba	Sumatera Barat		287.410.800
Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV	Meningkatnya Keterampilan dan Kepercayaan Diri Korban Napza / HIV	Sumatera Barat	20 orang	77.454.000
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba	Meningkatnya Pengetahuan PSKS/Masyarakat tentang Penanggulangan Narkoba dan PMS	Sumatera Barat	150 orang	-
Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza	Persamaan Persepsi antara Lembaga RBM dan Dinas Sosial dalam Penanganan Korban Napza	Sumatera Barat	55 orang	59.199.500
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Korban HIV	Jumlah UEP bagi Korban HIV'	Padang	20 orang	-
Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanganan HIV Bagi PSKS	Terlaksananya Bimtek Pencegahan dan Penanganan HIV	Padang	57 Orang	-
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Bimtek Penanganan HIV Bagi PSKS	Meningkatnya Pengetahuan PSKS/Masyarakat tentang Penanggulangan Narkoba dan Pencegahan dan Penanganan HIV	Padang	207 Orang	150.757.300
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah pelayanan sosial yang mendapatkan rehabilitasi			293.159.750
Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terujuknya penyandang disabilitas untuk mengikuti rehabilitasi di Pantu Rujukan	Sumatera Barat	12 Orang	128.303.500
Sosialisasi Program Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH)	Telaksananya Sosialisasi program penanganan ABH	Sumatera Barat	50 Orang	69.672.500
Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial	Telaksananya Bimbingan Teknis Satuan Bakti Pekerja Sosial	Sumatera Barat	50 Orang	68.120.600
Sosialisasi kegiatan Unit Institusi Layanan Sosial (UILS)	Terlaksananya Sosialisai Unit Informasi Layanan Sosial (UILS)	Padang	60 orang	27.063.150
Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan			7.558.107.378
Pengadaan Kelengkapan Klien	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan kelengkapan di panti	Sumatera Barat	255 orang	994.740.000
Seleksi Penerimaan Calon Kelayan	Jumlah calon kelayan yang dapat diterima	Sumatera Barat	355 Orang	91.750.000
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar (Lb.Alung)	Jumlah anak terlantar laki-laki yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan dalam panti	Sumatera Barat	160 orang	592.889.500
Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Budi Utama)	Jumlah anak dalam panti yang memperoleh pendidikan dan pelatihan	Sumatera Barat	75 orang	239.150.000
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan)	Jumlah anak terlantar perempuan yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan dalam panti	Sumatera Barat	100 orang	753.280.020
Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Tri Murni)	Jumlah anak asuh perempuan dalam panti yang memperoleh pendidikan dan pelatihan	Sumatera Barat	100 orang	463.821.050
Biaya Pendidikan Klien (Tri Murni)	Terlaksananya Biaya Pendidikan untuk Klien Tri Murni	Sumatera Barat	100 orang	278.586.300
Penyediaan Obat-obatan dan Jasa Dokter	Terlaksananya penyediaan bahan obat-obatan	Sumatera Barat	1 Tahun	26.452.000

Penyediaan Bahan Pendidikan (Budi Utama)	Jumlah anak asuh laki-laki yang terpenuhi biaya pendidikan dan berada dalam panti	Sumatera Barat	75 orang	205.360.000
Pengadaan Makanan dan Minuman	Jumlah anak terlantar yang memperoleh makanan dan minuman dalam panti	Sumatera Barat	355 orang	3.660.169.408
Rapat Koordinasi Pelayanan Rehabilitasi Kesos Anak	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tentang Rehabilitasi Sosial Anak	Dinas Sosial	125 orang	160.536.500
Sehari Bersama Anak	Terlaksananya Penyelenggaraan Sehari Bersama Anak	Dinas Sosial	200 orang	40.441.500
Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	Terlaksananya Pertimbangan Izin dan Pengangkatan Anak	Sumatera Barat	25 Orang	50.931.100
Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks.Trauma	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan keterampilan			3.342.957.588
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam panti	Sumatera Barat	85 orang	458.633.000
Biaya Makan dan Minuman Kelayan	Jumlah penyandang cacat yang memperoleh makanan dan minuman	Sumatera Barat	150 orang	1.670.894.220
Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Jasa Dokter	Terlaksananya penyediaan bahan obat-obatan	Sumatera Barat	1 Tahun	21.601.800
Biaya Kelengkapan Kelayan	Jumlah penyandang cacat dalam panti yang mendapatkan kelengkapan harian	Sumatera Barat	150 orang	357.393.000
Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang cacat retardasi mental dalam panti yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan	Sumatera Barat	100 orang	483.220.088
Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK	Terlaksananya Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK yang berada di Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	68 orang	132.559.500
Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas	Terlaksananya Bimbingan Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas	Sumatera Barat	1 Kegiatan	22.130.130
Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Karya (LBK)	Terlaksananya bimbingan dan Pelatihan keterampilan terhadap penyandang Diasabilitas melalui LBK	Sumatera Barat	15 Orang	113.422.850
Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh yang Peduli pada Penyandang Disabilitas	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh yang peduli kepada Penyandang Disabilitas	Sumatera Barat	52 Orang	83.103.000
Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan keterampilan			2.970.220.620
Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam panti	Sumatera Barat	180 orang	618.614.012
Biaya Kelengkapan Klien di Panti Jompo	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh bahan kelengkapan harian dalam panti	Sumatera Barat	180 orang	334.670.420
Biaya Makanan dan Minuman Klien di Panti Jompo	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh bahan kelengkapan harian dalam panti	Sumatera Barat	180 orang	1.875.587.688
Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Alat-alat Dokter Pakai Habis	Terlaksananya pengadaan obat-obatan	Sumatera Barat	1 Tahun	64.153.900
Biaya Jasa Penguburan/ Pemulangan Klien	Jumlah panti lanjut usia terlantar yang dapat dipulangkan dan memperoleh penguburan	Sumatera Barat	2 UPTD	37.000.000
Lanjut Usia Berkreasi	Terlaksananya kegiatan lanjut usia berkreasi	Sumatera Barat	250 orang	40.194.600
Bantuan Nutrisi Untuk Lanjut Usia Terlantar	Jumlah pendamping lanjut usia yang memperoleh bimbingan	Sumatera Barat	30 Orang	-
Bantuan UEP Lanjut Usia	Jumlah penerima bantuan UEP Lansia	Sumatera Barat	30 Orang	-

Tanggap Darurat Terhadap Lanjut Usia Terlantar	Terlaksananya Tanggap Darurat terhadap Lansia	Sumatera Barat	50 Orang	-
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila dan Penyakit Sosial Lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelayanan, bimbingan dan pelatihan dalam panti dan luar panti	Sumatera Barat		949.430.000
Pengadaan Kelengkapan (biaya klien)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang memperoleh biaya kelengkapan harian dalam panti	Sumatera Barat	40 orang	81.432.000
Biaya obat-obatan dan Jasa Dokter	Terlaksananya pengadaan obat-obatan	Sumatera Barat	1 Tahun	11.400.000
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyakit Sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam panti	Sumatera Barat	40 orang	390.036.000
Pengadaan Makanan dan Minuman	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang memperoleh makanan dan minuman dalam panti	Sumatera Barat	40 orang	466.562.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan			2.497.444.500
Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya penyuluhan sosial melalui penyuluhan sosial keliling dan berbagai media	Sumatera Barat	7 paket	114.900.000
Bimbingan Pengurus organisasi sosial se-Sumatera Barat	Terlaksananya Bimbingan bagi pengurus Organisasi Sosial se Sumatera Barat	Sumatera Barat	50 orang	56.872.000
Bimbingan Jejaring kerja LKS / orsos se Sumbar dalam rangka akreditasi	Terlaksananya Bimbingan Jejaring Kerja LKS/Organisasi Sosial se Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi	Sumatera Barat	50 orang	93.930.500
Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) berprestasi Tk.Sumbar	Terlaksananya Penilaian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (KT, Orsos, PSM dan TKSK) Berprestasi Tingkat Sumatera Barat	Sumatera Barat	52 orang	131.570.000
KSN Expo dan Award dalam HKSN	Terlaksananya keikutsertaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memeriahkan pameran KSN Expo dan Awards	Sumatera Barat	1 kegiatan	71.802.000
Penguatan Nilai-Nilai KSN	Terlaksananya Penguatan Nilai-Nilai KSN Tingkat provinsi	Sumatera Barat	1 kegiatan	171.878.000
Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar	Jumlah Peserta koordinasi LKKS se-Sumbar	Sumatera Barat	200 orang	621.848.000
Penguatan Peran Pilar Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah peserta kegiatan penguatan peran pilar sosial dalam penyelenggaraan kesos	Sumatera Barat	100 Orang	381.150.000
Penguatan Peran LKS Posdaya dalam penanggulangan kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesos	Terlaksananya Penguatan Peran LKS Posdaya di Kab/Kota	Sumatera Barat	960 orang	497.002.000
Bimbingan Kapasitas bagi TKSK se-Sumbar	Terlaksananya Bimbingan Kapasitas Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Sumatera Barat	Sumatera Barat	50 orang	97.956.000
Forum Komunikasi Pengurus Karang Taruna se-Sumbar	Terlaksananya pertemuan bagi Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	50 orang	54.550.000
Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumbar	Terlaksananya Bimbingan Kapasitas Bagi Pengurus KT se- Sumatera Barat	Sumatera Barat	50 orang	57.346.000
Pertemuan Forum Komunikasi PSM Se-Sumbar	Terlaksananya Pertemuan FK-PSM se-Sumatera Barat	Sumatera Barat	50 orang	50.798.000
Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	Terlaksananya Pelatihan Lanjutan bagi PSM yang telah mengikuti pelatihan dasar	Sumatera Barat	38 orang	40.542.000

Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	Terlaksananya Pelatihan Dasar PSM	Sumatera Barat	50 orang	55.300.000
Program Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah yang dapat diberdayakan dengan memberikan bimbingan dan bantuan			1.404.079.245
Bimbingan Motivasi Sosial/keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin (dalam rangka HARGANAS)	Terlaksananya bimbingan sosial keluarga dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga rentan miskin	Sumatera Barat	50 Orang	100.961.000
Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3	Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan LK3 bagi pengurus LK3 di 19 kab/kota	Sumatera Barat	50 Orang	98.763.000
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Rentan PMKS Gelandangan/Pengemis	Tersalurinya Bantuan UEP Bagi Rentan PMKS Gelandangan/Pengemis	Sumatera Barat	20 Orang	91.934.000
Sosialisasi Undian Berhadiah Gratis (UGB)	Terlaksananya Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah	Sumatera Barat	25 orang	53.545.000
Pelayanan Orang terlantar	Terlaksananya Pemulangan Orang Terlantar di Sumatera Barat	Sumatera Barat	35 orang	20.618.500
Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Terlaksananya Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif bagi Keluarga Rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Sumatera Barat	30 Orang	256.278.000
Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga Komunitas Adat Terpencil	Kab. Mentawai	30 Orang	52.322.000
Penetapan Calon Lokasi Pemberdayaan KAT	Terlaksananya Penetapan Calon Lokasi Pemberdayaan KAT	Kab. Mentawai	1 Rekomendasi	113.314.000
Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional	Terlaksananya persiapan calon Pahlawan Daerah	Padang	3 Pahlawan	105.283.000
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Padang	1 Kegiatan	55.660.905
Sumbar Expo (Publikasi)	Ikut sertanya Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan Sumbar Expo serta Tersedianya Jasa Informasi dan Publikasi	Padang	1 Kegiatan	148.448.000
Bimbingan Teknis Pemantapan Petugas Pendata PMKS	Terlaksananya bimbingan teknis pemantapan petugas pendata PMKS dan PSKS	Padang	179 Orang	273.599.400
Pembuatan Buku Data PMKS dan PSKS	Terlaksananya pembuatan buku data PMKS dan PSKS	Padang	100 Buku	33.352.440
Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin yang dapat ditangani			4.817.384.209
Pengadaan Beras untuk Panti Swasta	Jumlah anak panti swasta se Sumatera Barat yang mendapatkan bantuan beras	Sumatera Barat	4000 orang	2.971.357.300
Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi	Terlaksananya seleksi KUBE dan pendamping berprestasi tingkat provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	38 orang	156.994.100
Penumbuhan/Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan	Terlaksananya Bantuan KUBE untuk Pesisir dan Kepulauan	Sumatera Barat	8 KLP	299.800.000
Sosialisasi E-Warong Pedesaan	Terlaksananya Sosialisasi Program dan Kegiatan E-Warong di Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	50 Orang	86.779.900
Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT	Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT Kab/ Kota	Sumatera Barat	57 Orang	114.246.000
Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Terlaksananya Bintap BPNT	Sumatera Barat	60 orang	119.553.309
Bantuan Pengembangan E Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM	Terlaksananya Bantuan E-Warong dan KUBE Jasa	Sumatera Barat	6 KLP	225.678.400

Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai dan RASTRA Tahun 2019	Terlaksananya Koordinasi Program dan Kegiatan BNTN/RASTRA Provinsi dengan Tim Koordinasi BPNT/RASTRA Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	Sumatera Barat	50 Orang	292.489.900
Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan	Terlaksananya bimbingan pemantapan bagi pendamping KUBE dan fasilitator pemberdayaan fakir miskin	Sumatera Barat	50 Orang	86.879.900
Bantuan Penumbuhan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Perdesaan	Terlaksananya Bantuan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Sumatera Barat	20 KLP	463.605.400
Program Penanganan Korban Bencana dan Bencana Sosial	Jumlah Korban Bencana yang mendapat kebutuhan dasar dan pemulihan trauma			847.926.580
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Alam	Terlaksananya Penyusunan Laporan Logistik Bencana Alam	Sumatera Barat	50 Orang	82.829.200
Pemantapan Tim TRC Bencana Alam	Terlaksananya Pemantapan Tim TRC Bencana Alam	Sumatera Barat	50 Orang	85.041.200
Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam	Terlaksananya Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam	Sumatera Barat	50 Orang	82.829.200
Bantuan Logistik Bencana	Terlaksananya Pengadaan Bantuan Logistik Bencana Alam	Sumatera Barat	1 kegiatan	100.917.000
Rakor Bencana Sosial	Terlaksananya Rakor Bencana Sosial Tk. Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	55 orang	83.593.000
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial	Terlaksananya Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial	Sumatera Barat	50 Orang	64.279.200
Pertemuan Pendamping dan Operator PKH	Terlaksananya Pertemuan pendamping Program Keluarga Harapan	Sumatera Barat	43 Orang	61.053.960
Rakor Koordinator Program Keluarga Harapan	Meningkatnya koordinasi dalam kelancaran pelaksanaan PKH	Sumatera Barat	34 Orang	60.535.980
Sosialisasi Tingkat Provinsi Program Keluarga Harapan	Terlaksananya Sosialisasi Tingkat Provinsi Program Keluarga Harapan	Sumatera Barat	52 Orang	82.262.280
Konsinyering Koordinator PKH Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan	Terlaksananya Konsinyering Program Keluarga Harapan	Sumatera Barat	57 Orang	84.710.280
Bimbingan Teknis Pendamping Program Keluarga Harapan	Terlaksananya Bintek Program Keluarga Harapan	Sumatera Barat	40 orang	59.875.280

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang terukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas sosial.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu. Dengan adanya Renja tahun 2019, diharapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sehubungan dengan pelaksanaan anggaran kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2017, beberapa hal yang menjadi catatan penting :

1. Kondisi Sumatera Barat yang rawan bencana, untuk mengantisipasi perlu adanya kesiapsiagaan dari petugas dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat (emergency) bencana.
2. Banyaknya penyalahgunaan Napza yang terjadi baik secara Nasional khususnya Provinsi Sumatera Barat, perlu adanya antisipasi dan pencegahan terhadap pemakai dan pengedar Narkoba. Pencegahan penyebaran Napza perlu dilakukan secara optimal dan melakukan rehabilitasi terhadap pengguna Narkoba yang telah terbukti mengkonsumsinya.
3. Banyaknya kasus anak di Indonesia, perlu dilakukan antisipasi penanganan Anak yang Berhadapan dengan HUKUM (ABH). Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa untuk merehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di dalam Panti yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu perlunya dilakukan sosialisasi dan perbaikan panti untuk menampung Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut

Selain persoalan terkait dengan program prioritas kesejahteraan sosial, rencana tindak lanjut yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pembangunan kesejahteraan sosial harus berorientasi pada pembangunan yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan
2. Penyiapan UPTD dalam rangka pelayanan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan, korban trafiking, korban penelantaran dan eksploitasi anak serta kasus anak yang berhadapan dengan hukum serta melakukan revitalisasi terhadap UPTD yang akan melaksanakan pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud (UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dan PSBR Harapan Padang Panjang).

Dalam penyusunan Renja ini perlu disusun beberapa kaidah-kaidah yang terkait pelaksanaan Program/Kegiatan yang meliputi :

- a. Merencanakan perencanaan dan penganggaran yang berpedoman terhadap RPJMD dan Renstra yang telah disusun dan mengacu kepada RKP memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan.
- b. Mepedomani Urusan yang telah diatur sesuai dengan UU.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Urusan Konkuren Pemerintah Daerah.

Padang, Mei 2018
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat

H. Abdul Gafar, SE, MM
NIP. 19601225 198303 1 010